

ANALISIS EVALUASI LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Sofiani Oktafiana Putri
21312287@students.uii.ac.id
Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Laporan magang ini membahas analisis dan evaluasi laporan kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menilai kesesuaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta mengkaji pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi selama kegiatan magang, wawancara dengan pegawai terkait, serta studi dokumentasi dan studi pustaka terhadap dokumen kinerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum penyusunan laporan kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan mencerminkan Upaya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan hasil yang cukup baik serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada penguatan indikator kinerja berbasis outcome, pendalaman analisis keterkaitan antara anggaran dan hasil kinerja, serta peningkatan keterbukaan informasi laporan kinerja kepada Masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan dan penyajian laporan kinerja diperlukan guna mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja di masa mendatang.

Kata Kunci: Laporan Kinerja, Akuntabilitas, Transparansi, LKjIP, Pengadilan Negeri Sleman.

ABSTRACT

This internship report discusses the analysis and evaluation of the performance report of the Sleman District Court Class 1A as a form of accountability for the performance of government agencies. The purpose of writing this report is to assess the conformity of the preparation of the Government Agency Performance Report (LKjIP) with the guidelines of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), as well as to review the achievement of established performance indicators. The method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were obtained through observations during the internship, interviews with related employees, as well as documentation and literature studies of performance documents and applicable laws and regulations. The results of the analysis indicate that in general the preparation of the Sleman District Court Class 1A performance report has followed applicable provisions and reflects efforts to implement the principles of accountability and transparency. Performance achievements and budget realization show quite good results and are supported by the use of information technology in public services. However, there are still several aspects that need to be improved, especially in strengthening outcome-based performance indicators, deepening the analysis of the relationship between the budget and performance results, and increasing the transparency of performance report information to the public. Therefore, continuous improvement in the preparation and presentation of performance reports is necessary to support increased accountability and transparency in future performance.

Keywords: Performance Report, Accountability, Transparency, LKjIP, Sleman District Court.

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta penggunaan anggaran kepada publik dan pemangku kepentingan. Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun laporan kinerja yang mencerminkan capaian organisasi secara objektif, terukur, dan sesuai dengan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi terhadap laporan kinerja tersebut penting dilakukan untuk menilai kesesuaian penyusunan laporan dengan peraturan yang berlaku serta untuk mengukur tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, analisis terhadap laporan kinerja Pengadilan Negeri Sleman diperlukan guna mengetahui sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan kinerja organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyusunan laporan kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A dengan pedoman evaluasi kinerja instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja di masa mendatang.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengukuran kinerja merupakan aspek penting dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan kinerja secara transparan kepada masyarakat. Mahmudi (2019) menekankan bahwa pengukuran kinerja sektor publik harus memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, dan konsep value for money. Sementara itu, Mahsun (2006) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik tidak hanya menilai output, tetapi juga outcome dan dampak pelayanan kepada masyarakat. Armstrong & Baron (2005) menyatakan bahwa manajemen kinerja dapat meningkatkan efektivitas organisasi melalui penyelarasan tujuan dan kinerja individu. Selain itu, Bovens (2007) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja kepada publik. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa penerapan SAKIP dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait evaluasi laporan kinerja pada lembaga peradilan. Selain memberikan analisis empiris mengenai implementasi akuntabilitas dan transparansi kinerja di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A, penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh instansi terkait dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja sesuai dengan prinsip good governance. Di sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas evaluasi kinerja dan akuntabilitas pada instansi pemerintah.

TINJAUAN LITERATUR

Manajemen kinerja merupakan proses sistematis yang digunakan organisasi untuk merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Armstrong dan Baron (2005) menyatakan bahwa manajemen kinerja

merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan keberhasilan organisasi melalui peningkatan kinerja individu dan tim. Dalam sektor publik, manajemen kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kerja, tetapi juga pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan kinerja sektor publik harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas agar penggunaan sumber daya dapat memberikan manfaat yang optimal.

Evaluasi kinerja menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Robbins (2017) menyebutkan bahwa kinerja organisasi dapat diukur melalui pencapaian target, kualitas pelayanan, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dalam sektor publik, pengukuran kinerja juga berkaitan dengan output, outcome, dan dampak dari program yang dilaksanakan (Mahsun, 2006). Oleh karena itu, evaluasi kinerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program serta penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas mencakup proses pelaporan, penjelasan, dan pertanggungjawaban atas kinerja organisasi. Di Indonesia, penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini menekankan bahwa penerapan SAKIP, evaluasi kinerja, dan transparansi informasi berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi publik.

Berdasarkan teori manajemen kinerja, evaluasi kinerja, serta konsep akuntabilitas publik, penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pengelolaan kinerja organisasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan hipotesis bahwa penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan pedoman SAKIP akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, evaluasi kinerja yang dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Transparansi dalam penyampaian laporan kinerja juga diperkirakan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, khususnya lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, model penelitian dalam studi ini menggambarkan hubungan antara penerapan sistem akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, dan transparansi informasi terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi kinerja berbasis indikator kinerja utama, serta transparansi informasi publik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi publik. Dengan demikian, kualitas laporan kinerja dan proses evaluasi yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengevaluasi laporan kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A berdasarkan teori kinerja organisasi publik dan prinsip akuntabilitas. Subjek penelitian ini adalah pegawai atau staf bagian perencanaan, bagian umum, dan PTSP di Pengadilan Negeri Sleman. Objek penelitian ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri

Sleman Kelas IA tahun terakhir serta proses penyusunannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Selain itu teknik analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman yang berisi 3 tahapan yaitu ; Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA secara umum telah mengikuti pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Struktur laporan telah mencakup komponen utama seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi capaian indikator kinerja, serta analisis realisasi anggaran. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan observasi selama kegiatan magang, capaian indikator kinerja menunjukkan kinerja yang relatif baik, khususnya dalam hal penyelesaian perkara, pengelolaan administrasi peradilan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Implementasi sistem informasi peradilan dan digitalisasi dokumen turut mendukung peningkatan efisiensi pelayanan serta transparansi informasi kepada masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam penyusunan laporan kinerja. Pertama, sebagian indikator kinerja masih berorientasi pada output dibandingkan outcome sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dampak kinerja organisasi terhadap kualitas layanan publik. Kedua, analisis hubungan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja belum dijelaskan secara mendalam dalam laporan, sehingga keterkaitan antara penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai belum tergambar secara komprehensif. Ketiga, tingkat keterbukaan informasi laporan kinerja kepada publik masih dapat ditingkatkan untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyusunan laporan kinerja di Pengadilan Negeri Sleman telah mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja organisasi. Laporan kinerja berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan instansi pemerintah.

Dari perspektif akuntansi sektor publik, evaluasi terhadap LKjIP menjadi bagian dari mekanisme pengendalian manajemen yang bertujuan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan SAKIP pada lembaga peradilan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan instansi pemerintah lainnya karena indikator kinerja peradilan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administratif, tetapi juga kualitas penyelesaian perkara dan kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi peradilan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Digitalisasi dokumen, pengelolaan arsip elektronik, serta sistem informasi pelayanan perkara berperan dalam mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi data kinerja. Hal ini sejalan dengan tren reformasi birokrasi sektor publik yang menekankan transformasi digital sebagai sarana meningkatkan transparansi dan kualitas layanan publik.

Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi bahwa penguatan indikator

kinerja berbasis outcome menjadi tantangan penting dalam pengukuran kinerja lembaga peradilan. Indikator yang hanya berfokus pada jumlah perkara yang diselesaikan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan peradilan, seperti kepastian hukum, keadilan substantif, dan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan indikator kinerja yang lebih komprehensif diperlukan agar laporan kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dampak kinerja organisasi.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi kebaruan dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya dalam evaluasi kinerja lembaga peradilan, yaitu; (1) Integrasi evaluasi LKjIP dengan konteks lembaga peradilan, yang masih relatif terbatas dalam literatur akuntansi sektor publik. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana sistem akuntabilitas kinerja diterapkan pada institusi peradilan yang memiliki karakteristik organisasi dan indikator kinerja yang berbeda dari instansi pemerintah lainnya. (2) Pendekatan evaluatif terhadap keterkaitan antara anggaran dan kinerja (budget-performance linkage) dalam laporan kinerja lembaga peradilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja sebagai bagian dari praktik akuntabilitas sektor publik. (3) Penekanan pada transformasi digital dalam peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi peradilan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat transparansi dan pelaporan kinerja organisasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan praktik evaluasi kinerja sektor publik serta memperkaya literatur mengenai implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada lembaga peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap laporan kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah mengikuti pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ketentuan yang berlaku. Laporan kinerja tersebut telah mencerminkan upaya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga peradilan. Selain itu, capaian indikator kinerja serta realisasi anggaran menunjukkan hasil yang cukup baik dan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, seperti sistem informasi peradilan dan layanan administrasi yang lebih terintegrasi.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada penguatan indikator kinerja yang lebih berorientasi pada outcome, peningkatan kualitas analisis keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan hasil kinerja, serta peningkatan transparansi informasi laporan kinerja kepada masyarakat. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan kinerja serta mendukung akuntabilitas lembaga peradilan secara lebih optimal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan magang yang relatif singkat sehingga proses pengamatan terhadap seluruh tahapan penyusunan laporan kinerja belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bersumber dari dokumen internal instansi dan hasil wawancara dengan beberapa pegawai terkait, sehingga kemungkinan masih terdapat informasi yang belum tergali secara lebih mendalam.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini memiliki kemungkinan penerapan yang cukup

luas, khususnya sebagai bahan evaluasi bagi Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam memperkuat implementasi akuntabilitas kinerja, meningkatkan transparansi laporan kepada publik, serta mengoptimalkan hubungan antara perencanaan program, penggunaan anggaran, dan capaian kinerja organisasi.

REFERENCES

- Armstrong, M., & Baron, A. (2005). *Performance Management: A Strategic and Integrated Approach*. London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)
- Bovens, M. (2007). *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447-468
- Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Indra Kristian dkk. 'Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah', *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial* jurnaldialektika.com
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja*
- Mahkamah Agung RI. (2022). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, M (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
- Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Terakhir Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA. Rencana Kerja Tahunan*.
- Portal SIPP Mahkamah Agung: <https://sipp.mahkamahagung.go.id>
- Robbins, S.P. (2017). *Organizational Behavior (17th ed.)*. Pearson
- Schwarz, R. (1999). *The Skilled Facilitator: A Comprehensive Resource for Consultants, Facilitators, Managers, Trainers and Coaches*. Jossey-Bass
- Website Resmi Pengadilan Negeri Sleman: <https://pn-sleman.go.id>